
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA TIDAK MENGENAL 'ADAB'

JIHAD WAFDA

Abstract

Jihad Wafda
Universitas Gajah Mada

Email
jurnal@ppsuka.ac.id

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah ketiadaanya adab (the lost of adab). Rusaknya moral para pemimpin dan kaum terpelajar menjauhkan ummat ini dari kemajuan bangsa. Pendidikan menjadi alternatif terpenting yang berpengaruh dalam perbaikan ummat ini. Dalam Sila ke-2 dijelaskan tentang adil dan adab. Hal ini menguatkan bahwa Indonesia sejak berdirinya menginginkan tegaknya adab dalam masyarakat. Sayangnya pendidikan kita tidak mampu menjelaskan adab kedalam Sistem Pendidikan Nasional. Temuan teoritis menunjukkan bahwa perangkat formal pendidikan Indonesia tidak mengandung kata adab. Temuan lapangan juga menunjukan hal sama, bahwa adab masih menjadi kata asing dalam praktek pendidikan, terutama pendidikan islam.

Keywords : sistem pendidikan, nasional, adab

A. Pendahuluan

Moral memiliki peran penting dalam kemajuan sebuah Negara. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat dalam sebuah Negara berperilaku. Moral masyarakat dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Hilangnya moral masyarakat berarti hilangnya kehidupan bermasyarakat. Ketiadaan moral juga berarti penderitaan dan kesengsaraan karena moral menjadi ukuran kebaikan dalam sebuah tatanan sosial. Nilai-nilai kebaikan kemanusiaan seperti kasih sayang, kesetiaan, keadilan, kejujuran, dan menjaga kehormatan.¹

Indonesia sebagai sebuah Negara tentu memiliki sebuah nilai sosial yang dianut. Perkembangan nilai sosial berkaitan dengan konstrak budaya yang ada. Sejak berdirinya Negara Indonesia, pemerintah mencoba untuk memperbaiki moral masyarakat melalui pendidikan dan budaya. Pada tahun 2004, pemerintah memiliki gagasan untuk membuat Departemen Pembinaan Moral yang khusus mengurus masalah pembinaan moral masyarakat.² Hal ini

menunjukkan pentingnya moral bagi sebuah bangsa. Bahkan Thomas Lickona mengatakan bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran ketika karakternya tergadaikan.³

Moral memiliki kontribusi besar bagi perkembangan sebuah Negara. Banyak Negara yang mampu berkembang pesat karena menegakan nilai moral, sebutlahh Negara Singapura yang memiliki predikat sebagai satu-satunya Negara maju di Asia Tenggara. Sosok Lee Kwan Yew adalah orang yang berada dibalik kemajuan Singapura. Dia mampu mengubah budaya masyarakat menjadi lebih positif, misalnya Lee Kwan Yew membuat peraturan tidak boleh mudah sembarang tempat. Wal hasil Singapura menjadi Negara paling bersih di Dunia.⁴

Moral di sebuah Negara dapat dilihat dari nilai norma yang dianut dan bagaimana cerminan perilaku masyarakatnya. Sebut saja nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia yaitu Pancasila, yang didalamnya syarat akan nilai sosial, moral, religius, keadilan, dan demokrasi. Contoh pasal yang

¹ Ariefa Efaningrum, *Kultur Sekolah yang Kondusif bagi Pengembangan Moral Siswa*, Jurnal Dinamika Pendidikan, 2007, hlm. 1-38.

² Sri Hartana, *Reformasi Total dalam Pembinaan Moral*, kliping.kemenag.go.id, 2004.

³ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter Bangsa Berpendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

⁴ Razak Samik Ibrahim, *Pendidikan Karakter*, Harian Haluan, 2011.

membahas tentang moral adalah pasal 2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kata “beradab” ini merupakan kata yang mewakili karakter manusia yang saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, serta tidak semena-mena terhadap orang lain.⁵

Nilai atau norma yang dianut untuk membentuk moral disebut “*moral reasoning*”.⁶ Menurut Bandura perilaku moral dipengaruhi oleh persepsi seseorang dalam menangkap fenomena baik buruk, benar salah, atau yang disebut *moral reasoning*. Bandura berasumsi bahwa moral reasoning yang baik belum dapat menentukan perilaku moral yang baik pula. Moral reasoning dan moral conduct adalah sesuatu yang berbeda dan hubungan keduanya dapat dimediasi dengan pembiasaan moral.⁷

Dari pernyataan Bandura ini, menunjukkan bahwa pemahaman seseorang terhadap nilai moral belum dapat dipastikan muncul sebagai perilaku moral. Begitu banyak contoh kasus yang menunjukkan bagaimana seseorang yang dianggap berpendidikan ternyata melakukan perilaku yang tidak

bermoral. Para Professor di berbagai kampus yang menjadi teladan para mahasisnya justru melakukan hal yang tidak bermoral yaitu melakukan plagiasi dalam karya ilmiah mereka.⁸ Begitu juga para pemangku kebijakan yang seharusnya menjadi contoh keteladanan justru melakukan perilaku yang tidak bermoral dan merugikan masyarakat. Perilaku tersebut tercermin dalam persepsi masyarakat terhadap para pejabat elit, Hal tersebut dibuktikan dari Corruption Perceptions Index 2014 dengan posisi Indonesia berada pada peringkat 107 dari 175 negara dengan skornya 34. Peringkat tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan Negara yang dipersespsikan korupsi oleh masyarakat.

Hal yang sama juga terjadi pada pelajar Indonesia saat ini. Para pelajar yang belajar banyak terkait moral dalam kurikulumnya (seperti mata pelajaran PPKN, PAI, Pendidikan Akhlaq, dll) di sekolah. Nilai yang mereka dapatkan untuk mata pelajaran tersebut memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan nilai mereka memuaskan tetapi nilai tinggi tersebut belum tercermin dalam perilaku mereka. Banyak perilaku yang

⁵ Adian Husaini, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

⁶ Albert Bandura, *Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action*, London: Lawrence Erlbaum, 1991, hlm. 45-103.

⁷ *Ibid.*

⁸ Evan, *8 Kasus Plagiat yang Menghebohkan Indonesia*, Jakarta: 2014.

mencerminkan gambaran moral pelajar remaja, seperti pacaran, perilaku merokok pada pelajar laki-laki, perilaku merokok pada pelajar putri, perilaku minum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, seks bebas pada remaja, perilaku tawuran antar remaja, hingga perilaku pembunuhan.

Jarak antara pemahaman keilmuan dan implementasinya merupakan masalah besar yang dihadapi oleh ummat saat ini. Para pelajar tidak lagi mencerminkan keilmuannya, bahkan perilakunya selayaknya preman. Para pemimpin yang duduk dikursi-kursi kebijakan justru melakukan praktek korupsi dan tidak bersih. Al-Attas berpendapat bahwa permasalahan kepemimpinan umat hanyalah persoalan superficial dibandingkan dengan persoalan lain yang lebih mendasar. Kesalahan ini bersumber dari kebingungan dan kekeliruan persepsi keilmuan para pemimpin yang berada di setiap lapisan.⁹

Al-Attas menjelaskan kebingungan dan kekeliruan terus menerus-menerus pada setiap lapisan kepemimpinan masyarakat ini disebut

dengan keadaan ketiadaan adab (*the lost of Adab*). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan
2. Ketiadaan adab dari masyarakat
3. Munculnya para pemimpin yang tidak layak memimpin ummat dan tidak memiliki akhlak yang luhur dan kapasitas intelektual yang mencukupi.



Ketiga hal tersebut saling berhubungan berawal dari kebingungan dan kekeliruan dalam ilmu pengetahuan, selanjutnya hal ini akan menciptakan ketiadaan adab di masyarakat. Dari poin pertama dan kedua ini muncullah pemimpin yang tidak layak memimpin ummat. Para pemimpin ini akan bertahan dan meneruskan kerusakan pada point pertama.¹⁰

⁹ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003.

¹⁰ *Ibid.*

Untuk keluar dari lingkaran kerusakan ini, bukan dimulai dari point pertama tetapi dimulai dari point kedua (ketiadaan adab). Hal ini disebabkan ilmu pengetahuan tidak bisa diajarkan kecuali seorang pencari ilmu pengetahuan telah memenuhi semua persyaratan adab yang diperlukan.¹¹ Dalam hal ini adab menjadi hal paling dasar dalam perbaikan ummat.

Moral berbeda dengan adab. Perbedaan yang mendasari keduanya adalah cara pandang (*worldview*). Dalam *Islamic worldview* posisi adab lebih tinggi dari pada moral karena adab memiliki unsur transendental dengan Tuhan, sedangkan moral hanya berhenti pada urusan interpersonal dan lingkungan sekitarnya. Adab merupakan etika islam.¹² Makna adab menjadi sangat luas karena adab mengatur seluruh gerak-gerik manusia, seperti adab makan, adab belajar, adab berpolitik, dan sebagainya.

Permasalahan yang ingin penulis kupas adalah bagaimana dan sejauhmana adab ini diterapkan dalam pendidikan Indonesia? Bagaimanakah pendidikan Indonesia menjelaskan

konsep manusia beradab sebagaimana yang tercantum dalam Sila ke-2 pada Pancasila?

B. Pembahasan

Istilah Adab dalam literature Indonesia sangat terbatas. Banyak orang yang menyamakan antara adab dengan adat, padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Menurut KBBI adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan adab menurut KBBI adalah kehalusan budi pekerti, kesopanan, akhlak. Dalam hasanah pengetahuan di Indonesia, adab disamakan dengan budi pekerti, kesopanan, akhlak, padahal makna adab lebih luas. Pendefinisian kata adab disini belum menggunakan kacamata islam.

Al-Attas telah mendefinisikan adab menggunakan pandangan islam¹³, ia menjelaskan ;

Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki

¹¹ *Ibid.*

¹² Hamid Fahmi Zarkasyi, *Religious Education In Islam*, Jurnal ICCIE, 2012, hlm. 61-68.

¹³ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003.

tempatnyanya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritualnya.

Yang dimaksud dengan pengenalan adalah mengetahui kembali perjanjian pertama antara Tuhan dengan manusia sebagaimana yang tercantum dalam surat al-A'raf ayat 172¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa semua materi sudah berada pada tempatnya masing-masing dalam berbagai hierarki wujud. Sedangkan pengakuan yang dimaksud adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah dikenalnya.¹⁵

Adab erat hubungan dengan pendidikan. Al-Attas berpendapat bahwa penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang disebut dengan ta'dib, kata ini lebih mampu menjelaskan konsep pendidikan islam. Al-Attas mengatakan "struktur konsep ta'dib sudah mencakup unsur-unsur

ilmu (*'ilm*), instruksi (*ta'lim*) dan pembinaan yang baik (*tarbiyah*) sehingga tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep pendidikan islam adalah sebagaimana terdapat dalam tiga serangkai konsep "*tarbiyah-ta'lim-ta'dib*".¹⁶

Dasar konstitusi Negara Indonesia adalah Pancasila. Perumusan Pancasila yang diawali dengan Piagam Jakarta tidak bisa lepas dari rumusan para tokoh-tokoh islam. Mereka adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Abdu Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Mereka terkumpul dalam panitia Sembilan yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dari seluruh panitia yang ada hanya satu yang beragama Kristen ialah A.A. Maramis.¹⁷

Menafsirkan Pancasila tidak bisa lepas dari pandangan Islam. Hal ini dikarenakan pandangan para perumusnyanya. Jika mengambil kata-kata kunci dalam Pancasila seperti : Ketuhanan Yang Maha Esa, adil,

¹⁴ Surat Al-A'raf ayat 72 yang artinya "dan ingatkah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman '*bukankah Aku ini Tuhanmu?*' mereka menjawab: '*betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi*'. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: '*sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Tuhan)*'".

¹⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

beradab, hikmah, dan permusyawaratan, maka sudah jelas bahwa pandangan islam masuk ke dalam Pancasila. Sehingga menafsirkan Pancasila secara serampangan maupun sekuler yang lepas dari pandangan islam adalah sebuah kesalahan.¹⁸

Dalam Sila ke-2 berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Dalam sila tersebut secara jelas disebutkan 2 kata kunci penting Adil dan Adab. Kedua kata tersebut tidak dapat diterjemahkan kecuali menggunakan pandangan islam, karena bangsa Indonesia tidak memiliki kosa kata tersebut jika islam tidak masuk Indonesia. Kata adab hanya diartikan sebagai sopan santun, padahal menerjemahkan kata adab tidak bisa menggunakan khasanah bahasa Indonesia saat itu, kata adab sangat jelas sekali bahwa itu berasal dari islam. Menerjemahkan kata adab perlulah merujuk kepada ulama islam seperti : K.H. M. Hasyim Asy’ari (Pendiri NU) dalam bukunya *Aadabul ‘alim wal-muta’allim*, Burhanuddin Al-Zarnuji dalam bukunya *Ta’lim al-Muta’allim: Thariq al-Ta’allum*, dan yang terbaru

Syed Naquib Al-Attas dalam *The Concept of Education in Islam*.

Hingga detik ini, masih terasa bagaimana masyarakat Indonesia menafsirkan adab sebagai sopan santun yang bebas nilai agama. Hal itu tercermin dari terjemahan dalam Kamus Besar Indonesia. Yang lebih parah lagi kata adab ini tidak diturunkan menjadi point-point penting dalam hukum konstitusi Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan karena adab lekat dengan dunia pendidikan. Kesalahan fatal ini dikarenakan menerjemahkan adab tidak menggunakan bahasa aslinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, kata “adab” sama sekali tidak muncul. Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Sekolah Dasar yang di rumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional 2007, Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini dari Departemen Pendidikan Nasional 2007, Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan edisi 2004 dari Departemen Pendidikan

¹⁸ *Ibid.*

Nasional, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Semua perangkat pendidikan ini tidak mencamtumkan kata “adab” apalagi kata “beradab”. Lalu pendidikan Indonesia mencetak manusia yang seperti apa?

Sejauh ini Indonesia belum mampu menerjemahkan kata “beradab” yang termaktub pada Sila ke-2 ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh pemikiran sekuler yang ingin melepaskan pendidikan dari islam, atau kepolosan para pakar pendidikan yang terwarnai pemikiran barat. Padahal pendidikan Indonesia tidak bisa lepas dari nilai-nilai religious sebagaimana yang disampaikan Notonagoro, yaitu :

Nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia bukan hanya nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan, tetapi masih ditambah ciri khas adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab tidak memisahkan kemampuan akal dari rasa dan kehendak, tetapi

menyatukannya dalam kerjasama. Kerjasama akal, rasa, dan kehendak disebut budi atau kepercayaan-keyakinan. Budi dapat mengenal dan memahami nilai religius sebagai kenyataan mutlak. Nilai religius meliputi nilai-nilai keabadian dan kesempurnaan yang memunyai sifat mutlak dan tetap atau tidak berubah. Kemanusiaan yang adil meliputi hubungan keadilan selengkapnya, yaitu adil pada diri sendiri, masyarakat dan negara, serta pada Tuhan sebagai asal mula manusia. Negara Indonesia bukan lembaga agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan nilai-nilai religius yang telah diwahyukan oleh Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹

Dari berbagai perangkat legislasi pendidikan, banyak menyinggung tentang akhlak dan takwa. Bahkan disebutkan dengan jelas tentang tujuan

¹⁹ Sri Soeprapto, *Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2013, hlm. 266-276.

pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal yang perlu dicermati dari tujuan Sistem Pendidikan Nasional adalah output dari pendidikan itu sendiri, yaitu menjadikan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang aneh disini, bagaimana menciptakan manusia yang takwa dan berakhlak tanpa melalui proses penanaman adab (*ta'dib*). Hal ini tidak selaras dengan penemuan Al-Attas, bahwa takwa adalah produk langsung sekaligus tujuan inti pendidikan (dalam arti *ta'dib*)²⁰ dan

²⁰Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, hal.284. Ta'dib yang menurut Al-Attas adalah

akhlak merupakan kandungan dari pendidikan (dalam arti *ta'dib*)²¹. Artinya apa yang diharapkan dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia untuk mendapatkan manusia yang unggul sudah baik, hanya saja SISDIKNAS meninggalkan satu proses penting dalam pendidikan yaitu penanaman adab.

Dalam perangkat pendidikan juga disebutkan tentang fungsi Sistem Pendidikan Nasional yaitu “membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”. Termaktub kata “peradaban” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin, hal yang menyangkut sopan santun, budi pekerti. Sedangkan akar kata dari peradaban adalah adab yang

arti langsung dari pendidikan merupakan pengakuan mengenai tempat yang tepat bagi sesuatu menurut tingkatan penciptaan yang ditanamkan secara progresif ke dalam diri manusia sehingga akan mengarah pada pengakuan terhadap Tuhan dalam tatanan wujud dan maujud.

²¹Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, hal 176-177. Hal ini selaras dengan hadist yang berbunyi “Tuhan telah mendidikku (*addabani*, yang secara literal berarti telah menanamkan adab pada diriku), maka sangat baiklah mutu pendidikanku (*ta'dib*). Wan Mohd Nor Wan Daud menjelaskan bahwa pendidikan Nabi Muhammad SAW dijadikan pendidikan terbaik yang didukung oleh Al-Qur'an yang mengafirmasikan kedudukan Rasulullah yang mulia, teladan yang paling baik. Kemudian dikonfirmasi pada hadist Nabi “*innama bu'itstu li-utammima makarimal akhlaq*”.

ternyata tidak termaktub dalam hukum formal pendidikan. Jika adab tidak ada bisa jadi Indonesia masuk dalam tahap ketiadaan adab (*the lost of adab*) atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut biadab (belum beradab).

Praktek pendidikan di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk yang sangat beragam, sekolah negeri, swasta, yayasan, pesantren, *home schooling* dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kualitas output pendidikan, memiliki gradasi yang cukup luas. Bahkan pendidikan Indonesia memiliki keunikan yang tidak ada di negara lain yaitu pendidikan kita diampu oleh dua kementerian yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terjadi dualisme pendidikan dalam tubuh Negara.²² Ada pesimisme dari penulis, apakah Indonesia mencoba untuk memisahkan antara pendidikan dengan agama? Atau memang negara ini sudah benar-benar menganut pendidik sekuler, sehingga Kementerian Agama muncul untuk meng-*counter* itu?

Terlepas dari dualism ini, perlu di kroscek kembali sejauh mana

perkembangan islam dalam dunia pendidikan. Tidak ada jaminan sekolah binaan Kementerian Agama jauh lebih baik dari pada sekolah-sekolah turunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dalam hal *output* pendidikannya. Bisa jadi islam berkembang pesat di pendidikan formal dari pada di pendidikan yang berafiliasi islam. Pada intinya perkembangan islam dalam dunia pendidikan memang harus diperjuangkan.

Penulis mencoba untuk mencari data terkait adab di sebuah lembaga pendidikan dengan observasi dan wawancara. Lembaga pendidikan ini merupakan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu di sebuah kota. Yang menarik adalah guru tidak mengetahui atau mengenal apa itu adab. Yang guru tahu akhlak, moral, budi pekerti. Bagi penulis ini adalah sebuah keanehan yang menarik. Sekolah yang berlabel Islam Terpadu ternyata belum memahami apa itu adab. Artinya adab belum begitu dikenal dikalangan pendidik yang berafiliasi islam.

Kata adab masih asing dalam dunia pendidikan. Dalam kurikulum sekolah tersebut, penulis menemukan bahwa Pendidikan Agama Islam dibagi menjadi 4 konsentrasi yaitu : aqidah

²² Abdul Wahab, *Dualime Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Lentera Pendidikan, 2013, hlm. 220-229.

akhlaq, Qur'an hadist, bahasa arab, dan sejarah kebudayaan islam. Tidak ada pendidikan adab secara khusus yang diajarkan kepada siswa. Sekolah menggunakan sistem *boarding school*. Siswa terlibat secara penuh dalam sekolah selama 24 jam. Kelebihan sekolah ini adalah adanya pendidikan asrama. Siswa dibina dan didik agar memiliki akhlak yang baik. Ada pengakuan dari guru BKnya bahwa belum dapat membedakan antara adab dengan akhlaq "bisa jadi yang dimaksud dengan adab adalah akhlaq yang baik yang sering dilakukan oleh guru asrama".

Data diatas adalah kondisi nyata dari sebuah sekolah yang berafiliasi islam. Kurangnya pemahaman adab bukan berarti tidak beradab, tetapi ketidaktahuan konsep dan maksudnya. Inilah realita sekolah islam, bagaimana dengan sekolah formal yang pendidikan agamanya belum terjamin adanya? Hal ini menjadi koreksian besar bagi pendidikan islam dalam dunia pendidikan di Indonesia.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Masyarakat Indonesia memiliki masalah moral yang mendasar. Padahal

moral adalah ukuran kemakmuran sebuah bangsa, ketika moral tergadaikan maka kehancuran sebuah bangsa adalah sebuah keniscayaan. Para pelajar tidak lagi mencerminkan keilmuannya, bahkan perilakunya selayaknya preman. Para pemimpin yang duduk dikursi-kursi kebijakan justru melakukan praktek korupsi dan tidak bersih.

Al-Attas berpendapat bahwa permasalahan kepemimpinan umat hanyalah persoalan superficial dibandingkan dengan persoalan lain yang lebih mendasar. Kesalahan ini bersumber dari kebingunan dan kekeliruan persepsi keilmuan para pemimpin yang berada di setiap lapisan. Solusi awal untuk keluar dari permasalahan mendasar ini adalah ditegakkan adab.

Adab menurut KBBI adalah kehalusan budi pekerti, kesopanan, akhlak. Dalam hasanah pengetahuan di Indonesia, adab disamakan dengan budi pekerti, kesopanan, akhlak, padahal makna adab lebih luas. Al-Attas menjelaskan :

Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-

tingkatnya, dan bahwa seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritualnya.

Temuan teoritis menunjukkan bahwa kata adab tidak ditemukan dalam perangkat formal pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara Pancasila dan Sistem Pendidikan Nasional. Dimana di Sila-ke 2 tercantum kata “beradab”. Sayangnya kata itu tidak dijelaskan secara jelas. Justru yang tercantum dalam perangkat pendidikan adalah takwa dan akhlak. Dalam hal ini akhlak dan takwa merupakan hasil dari adab. Maka sudah jelas bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia masih setengah-setengah dalam menerapkan islam.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kata adab belum dipahami oleh guru dan sekolah yang berafiliasi islam. Ketidakpahaman ini bukan berarti tidak beradab tetapi belum mengetahui konsep dan maksudnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada praktek dalam dunia pendidikan terutama yang berafiliasi islam tentang pendidikan adab secara khusus.

Tulisan ini tidak lepas dari evaluasi dan koreksi. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan paper ini banyak data yang kurang dan belum mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai “adab”. Misalnya penulis hanya mengambil satu sample untuk sekolah yang berafiliasi islam, sehingga kemungkinan terjadinya bias sangat besar.

Untuk itu penulis memberikan saran kepada peneliti yang akan datang untuk menambah sample sekolah agar validatas data terpenuhi. Harapan penulis juga semakin banyaknya para peneliti yang fokus membahas tentang perkembangan adab di Indonesia, melihat sangat sedikit sekali literature yang membahas tentang adab. Penulis juga meraskan kesulitan dalam mencari literatur Indonseia yang meneliti tentang adab.

2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Antono Suryoputro, N. J, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja Di Jawa Tengah: Implikasinya Terhadap Kebijakan Remaja Di Jawa Tengah: Implikasinya Terhadap Kebijakan*, Makara Kesehatan.
- Ardhianita, I., & Andayani, B, 2005, *Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran*, Journal Psikologi.
- Arina Uswatun Hasanah, S, 2011, *Hubungan Antara Dukungan Orang Tua, Teman Sebaya Dan Iklan Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa Laki-Laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali*. GASTER.
- Bandura, A, 1991. *Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action*. In W. M. Gewirtz, *Handbook of Moral Behavior and Development* (pp. 45-103). London: Lawrence Erlbaum.
- Cipto, & Kuncoro, J, 2010. *Harga Diri Dan Konformitas Terhadap Kelompok Dengan Perilaku Minum Minuman Beralkohol Pada Remaja*, Jurnal Psikologi Proyeksi.
- CPI14, 2014. *Corruption Perceptions Index 2014*, Transperency International.
- Daud, W. M, 2003, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung: Mizan.
- Efianingrum, A, 2007, *Kultur Sekolah yang Kondusif bagi Pengembangan Moral Siswa*, Jurnal Dinamika Pendidkan, 1-38. Retrieved from <http://kliping.kemenag.go.id: http://kliping.kemenag.go.id/downloads/6782e8d873a66f501d52d6b1aee1b4c7.pdf>
- Evan, 2014, *8 Kasus Plagiat yang Menghebohkan Indonesia*, Jakarta, indonesia.
- Hartana, S, 2004, *Reformasi Total dalam Pembinaan Moral*, Retrieved from <http://kliping.kemenag.go.id: http://kliping.kemenag.go.id/downloads/6782e8d873a66f501d52d6b1aee1b4c7.pdf>
- Husaini, A, 2009, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Husaini, A, 2013, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibrahim, R. S, 2011, *Pendidikan Karakter*. Retrieved from [Harian Haluan: http://www.harianhaluan.com/index.php/refleksi/4650-pendidikan-karakter](http://www.harianhaluan.com/index.php/refleksi/4650-pendidikan-karakter)

- Indonesia, P. B, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Nindapitra, C, 2015, *Studi Kasus Remaja Putri Yang Berperilaku Merokok Di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Univeritas Negeri Yogyakarta.
- Nuri Aprilia, H. I, 2014, *Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di SMK 'B' Jakarta*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan.
- Soeprpto, S, 2013, *Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan.
- Tito, S. S, 2014, *Analisis Penyebab Remaja Mengkonsumsi Narkoba Ditinjau Dari Kesalahan Pendidikan Keluarga Di Pontianak*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran.
- Wahab, A, 2013, *Dualisme Pendidikan di Indonesia*, Lentera Pendidikan.
- Wibowo, A, 2012, *Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyatmoko Cikal, I. F, 2014, *Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang*, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- Zarkasyi, H. F, 2012, *Religious Education In Islam*, ICCIE.